

BAB III

Peran Partai Golkar Dalam Memperjuangkan Undang Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

A. Pandangan Partai Golkar Terhadap Kesitimewaan DIY.

Sejak awal kemerdekaan dan sampai sekarang ini banyak sekali transisi perubahan kekuasaan. Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru baru ini di Goyangkan oleh isu status Keistimewaan Yogyakarta, namun akhirnya dapat terselesaikan dengan disahkannya UUK Daerah istimewa Yogyakarta

Bagaimanapun juga Jogjakarta menjadi basis terakhir menentukan NKRI itu dibukatkan serangan umum 1 maret dibawah kepemimpinan Sultan dan Pak Harto komandan lapangan mempertahankan dan itu dicatat di PPB bahwa Ibukota saat itu di Jogjakarta tentu dengan landasan Historis semacam itu pada saat itu mematahkan tentunya secara Hukum Internasional dan Politik pada waktu serangan umum satu maret itu mematahkan diplomasi Belanda seolah olah Belanda telah merebut kembali Negara penjajahannya ini dengan adanya serangan umum satu maret itu di situlah membuka boroknya Belanda apa yang di katakana Belanda itu tidak benar. Dan setelah itu diadakan pertemuan Meja Bundar diminta Belanda untuk menarik diri Peran semacam inilah Golkar melihat sebagai estaten penting Sejarah Perjalanan Jogjakarta

Pada saat awal Partai Golkar sebelum menyimpulkan menjadi 5 poin tidak hanya Pariwisata namun Golkar juga memasukan Pendidikan masuk didalamnya, Partai Golkar berharap DIY memelopori tentang pengembangan sumber daya manusia dan kalau DIY ini mempunyai komitmen yang kuat berdasarkan faktor sejarahnya membangun nusantara ini, Partai Golkar berharap DIY ini mempunyai satu kekhasan satu ke khususnya, mungkin bisa di ukur Pendidikan diluar DIY itu biaya Pendidikan yang mahal tapi di DIY itu pendidikan yang mudah terjangkau disemua lapisan masyarakat dan Partai Golkar ada keperpihakan kepada masyarakat . Karena di DIY ini juga lahirnya tokoh-tokoh pendidikan kita seperti Kh. Ahmad dahlan, Kh Dewantara . berarti ada keterpanggilan sejarah yang kuat oleh beban daerah ini adalah komitmen peningkatan sumber daya manusia daerah ini harus mempunyai Peran yang menonjol untuk itu supaya masyarakat nusantara terakomodir dengan baik maka tolak ukur yang sederhana adalah mungkin di daerah lain biaya Pendidikan terlalu mahal dan sulit terjangkau oleh masyarakat menengah kebawah namun di DIY ini di buat satu standar . namun ini tidak masuk karena sekarang ini pendidikan sudah masuk dalam industri pendidikan segala sesuatu diukur dengan uang sehingga Pendidikan menjadi mahal, tapi melepaskan landasan landasan Idiologis ketuhan Negara ini sebagai Historis.

Negara sudah mengakui hanya pada waktu itu tentang ke Istimewaan DIY hanya saja baru sebatas pokok-pokoknya saja. Namun substansi intinya secara utuh kandungan didalamnya belum diatur secara tegas, menurut Golkar kalau Negara ini mau mengakui daerah ini sebagai daerah Istimewa maka Negara juga harus juga harus mau untuk mengatur secara lebih utuh sehingga posisi segala kewenangan Keistimewaan DIY dihargai secara baik.

Indonesia merupakan Negara Demokrasi Perwakilan dimana kekuasaan berada ditangan Rakyat, dengan diwakilkan oleh lembaga DPR, dan DPRD, pada masa orde baru Pemerintahan bersifat Sentralisasi dimana hasil semua dari daerah akan akan di kirim kepusat dan kemudian baru di kirim kedaerah daerah, di Indonesia, pola perkembangan wilayah sebelum tahun 1998 mengalami perubahan sejak bergulirnya era reformasi setelah tahun 1998. Fenomena tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi (otonomi daerah). Kebijakan tersebut tertuang dalam UU No. 2 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004. Dalam rangka implementasi kebijakan tersebut maka dikeluarkan PP No. 129 tahun 2000 tentang persyaratan dan tata cara pembentukan daerah otonom baru, penghapusan dan penggabungan daerah otonom.

Peraturan Pemerintah tersebut kemudian diganti dengan PP No. 78 tahun

Daerah otonom sekarang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan wilayah biasanya merupakan wujud dari keinginan masyarakat disuatu daerah untuk tumbuh dan berkembang dari segi Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya dan Keamanan, dalam dimensi Geografis. Kondisi tersebut dapat dilihat dari semakin rapatnya jaringan jalan, semakin meluasnya wilayah Perkantoran dan Perdagangan, semakin menyebarnya wilayah pemukiman dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan tingginya peluang kerja.

Beberapa waktu yang lalu Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dihebohkan dengan diangkat kembali dan dipertanyakan tentang status Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan yang menjadi permasalahan tentang Pemerintahan, tentang Bidang Pertanahan, tentang Bidang Budaya, Kemajuan Demokrasi Di Indonesia menuntut Daerah untuk bisa mempertahankan atau justru meninggalkan kebiasaan.

Sebagaimana mestinya Peran Partai sangatlah dibutuhkan dalam hal ini sebagai mediasi antara masyarakat dan Pemerintah disini Peran Partai sebagai penghubung kedua hal tersebut menjadi penting karena

Peran penting dari Partai Politik adalah fungsi sosial Politiknya sebagai 'mediator'. antara massa rakyat/ konstituensinya dan Elit Partainya di Parlemen. Artinya Peran Partai disini secara aktual memiliki data base tentang aspirasi masyarakat yang diartikulasikan oleh Elit Partainya untuk diperjuangkan menjadi suatu kebijakan atau setidaknya kalau posisinya sebagai oposan memiliki kemampuan Politik untuk mempengaruhi kebijakan rezim Pemerintah sebagaimana yang diharapkan.

Partai Golkar mengerahkan pasukannya untuk mencari tau tentang permasalahan ini tentang keinginan masyarakat tetang daerah ini, Golkar meminta kemurnian pikiran masyarakat Jogja karena Golkar itu ingin kemurnian pemikiran bukan dimobilisasi Golkar melakukan survei 86,7% pendapat menginginkan penetapan namun Partai Golkar tetap mendengarkan dan tidak mengabaikan pendapat yang tidak setuju terhadap penetapan dan Masing masing kabupaten itu diambil sampel 500 sampling dan terdiri dari 5 Kabupaten berarti jumlah sampling 2500 sampling. Golkar dalam menentukan daerah Jogja berdasarkan dari masyarakat apa yang dikehendaki masyarakat,

1. Kontribusi Partai Golkar Terhadap UUK DIY

Dalam hal ini saya mencoba memaparkan tentang Peran Partai Golkar DIY dalam memperjuangkan Keistimewaan DIY dan apa saja kontribusi yang diberikan Partai Golkar Terkait dengan Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta berikut yang merupakan usulan dari Partai

Golkar terkait dengan Undang Undang keistimewaan Yogyakarta yang masuk dalam pokok utama pembahasan yang diajukan oleh Partai Golkar kepada Pemerintah Pusat berikut adalah Lima poin penting tersebut: ²⁴

a. KeIstimewaan Yogyakarta Bidang Pemerintahan

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan satu Propinsi yang memiliki ciri khas atau ke Istimewaan dibanding daerah lain. Salah satu yang membedakan adalah Pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh kraton, walau kita tahu bahwa sistem kerajaan sudah tidak lagi dianut oleh bangsa Indonesia, namun kraton masih mempunyai peranan yang penting dalam Pemerintahan Yogyakarta yang sekaligus menjadi ciri pembeda dengan daerah daerah lain.

Menurut Golkar masalah tata cara pengakatan itu adalah penting karena supaya tidak ada kerancuan mana yang menjadi ranah Kraton dan mana yang menjadi ranahnya Pemerintahan atau publik. sultan menggunakan hanya Hamengkubuwono sehingga penataan kelembagaan harus di atur secara baik jangan sampai dalam penyelenggaraan itu terjadi praktek Monarki Kontitusional pada sekarang terjadi apakah Sri Sultan itu dimasukan atau tidak dalam Perda Keistimewaan, itulah yang kemaren menjadi perdebatan yang luar biasa dan Golkar dalam posisi ini Golkar menganggap gelar Sri Sultan itu cukup dituangkan dalam UU

²⁴ "Dikutip dari hasil wawancara dengan "Korbid Pendidikan dan pelatihan "Jhon Serang. Keban . DPD partai Golkar

Keistimewaan karena bila itu dijabarkan dengan pemahamannya maka secara tidak langsung kita akan memberlakukan prinsip prinsip Monarki Konstitusi karena wilayah gelar Srisultan sudah menjadi ranah Pemerintahan Kraton bukan wilayah publik, sedangkan untuk wilayah publik itu dari dulu sri sultan menggunakan nama Hamengkubuwono itu membedakan nama yang menjadi ranah Publik dan mana yang menjadi ranah Kraton nama sebagai Raja dan mana sebagai Gubernur. Ini menjadi penting apalagi sekarang kraton menjadi lembaga kebudayaan harus di lestarikan dan itu menurut Golkar yang harus di cermati dalam rangka seluruh kerja kerja Peraturan Daerah dalam rangka untuk menjabarkan amanat UUK DIY ini baik Pemerintah maupun DPR juga masukan masukan dari masyarakat agar kita tidak terjebak dalam pemahaman yang keliru terhadap penjabaran UUK DIY.

Namun hal yang paling penting dalam menjalankan pemerintahan bukan hanya terletak pada pemerintahan dan siapa yang memimpinnya namun harus bisa melayani masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga bagaimanapun yang memimpin kelak harus bisa mengayomi masyarakat. Namun aturan juga harus jelas sehingga tidak menimbulkan kerancuan dikemudian hari jadi semua harus jelas sehingga kemudian hari tidak menimbulkan gejolak lagi .Pemerintahan yang baik adalah bagaimana sebuah kebijakan yang diambil bila mana melibatkan

semua pihak sehingga dapat meminimal kelompok yang merasa dirugikan dan dapat mengurangi penyalah-gunaan kekuasaan dan korupsi.

b. Keistimewaan Bidang Pertanahan.

Sejak Indonesia merdeka kehidupan Di Yogyakarta tenang tenang saja namun seolah olah sudah menjadi kenyataan Sejarah yang diterima masyarakat Yogyakarta, namun tiba tiba saja menjadi suatu permasalahan yang muncul ke permukaan dan menjadi perbincangan Publik. Dahulu pada jaman masa Soekarno dan Soeharto Indonesia terutama masyarakat Yogyakarta belum pernah mempertanyakan tentang Keistimewaan namun akhir akhir yang lalu status Keistimewaan mencuat dihadapan Publik.

Sekarang ini Rancangan Rancangan dari Eksekutif sudah diberikan kepada Dewan namun rancangan itu masih mentah masih banyak subtansi subtansi yang diminta oleh Dewan belum disiapkan oleh Eksekutif contoh mana saja tanah Sultan Ground dan mana tanah tanah Pakualaman karena itu harus jelas ya kalau ingin lima subtansi itu disusun satu persatu lengkap partai Golkar memberikan waktu temen temen di Fraksi Partai Golkar Di Provinsi kalau data data yang dibutuhkan dalam rangka menyusun lima aspek itu belum lengkap maka trobosan agar tidak terjadi kekosongan dan supaya dana dapat dicairkan maka di buat dulu Perda Istimewa Induknya yang menyakungkut lima Poin pokok, supaya ini menjadi jalan untuk bisa mencairkan dana Istimewa kita yang dialokasikan sekitar 500 miliar lebih itu memayongi dulu dan nanti setelah data data

lengkap baru di*Breakdown* untuk menyusun Perda Istimewa yang menyangkut lima poin tersebut yang dibuat secara sendiri sendiri namun menginduk kepada Perda Induk, menurut partai Golkar DIY.

Jauh dari pada itu yang paling utama adalah pemanfaatannya harus jelas kepada siapa namun diharapkan pemanfaatan ini bukan untuk kepentingan wilayah Kraton namun dimanfaatkan untuk masyarakat umum, sehingga masyarakat bisa langsung bisa merasakan dampak dari pada undang undang Keistimwaan, karena siapapun yang memimpin Jogja harus untuk kepentingan masyarakat. Sebab dana untuk daerah Istimewa itu tidak sedikit jadi penggunaannya harus semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat Yogyakarta sehingga masyarakat bisa merasakan langsung.

c. Keistimewaan Bidang Sosial Budaya

Zaman sudah berubah Kraton hanya dianggap peninggalan Sejarah dan juga Budaya yang harus dilestarikan namun tidak halnya dengan Yogyakarta Kraton mempunyai Peran yang sangat penting dalam Pemerintahan bahkan hampir tidak bisa dipisahkan antara kraton dan juga Pemerintahan dimana sekarang ini berhubungan satu sama lain. Kraton juga sebagai penyeimbang antara Sosial juga Budaya,

Ratu Hemas Di Jakarta itu melalui DPD cukup getol juga untuk memperjuangkan menyangkut masalah bagaimana isi dari pada Draft

Rancangan Undang Undang Keistimewaan itu harus di pertimbangkan menurut pemahaman kraton dan Ratu Hemas menggunakan lembaga DPD untuk memperjuangkan itu ditingkat DPR dan ada beberapa pertimbangan termasuk menyangkut masalah Gelar Sultan dan bagaimana kelanjutan suksesi di Kraton. Apakah laki laki atau perempuan memang ada pemikiran pada waktu itu ada analog Presiden RI pernah dipimpin oleh perempuan Kratonpun bisa juga berubah tidak harus menjadi Sultan bisa saja menjadi Ratu karena Kraton ini tidak lagi menjadi lembaga Hukum dan lembaga Politik tapi sekarang ini hanya menjadi lembaga Kebudayaan ya berbeda dengan dahulu jadi kalau lembaga kebudayaan bisa saja pada suatu saat dipimpin oleh seorang perempuan menurut pandangan Ratu Hemas pada waktu itu. Dan itu sengaja di lempar ke publik bagaimana pendangannya terhadap hal tersebut. Menurut partai Golkar DIY.

Pada konteks inilah keistimewaan idealnya mengatur hak hak rakyat. Keistimewaan harus memeberikan rasa aman kepada masyarakat dalam memenuhi hak hak berpolitik maupun hak Ekonomi Sosial dan juga Budaya. Perjuangan dalam rangka untuk melestarikan kebudayaan masyarakat setempat sangat penting sehingga tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat dan bagaimana keinginan masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam melestarikan kebudayaan Di Yogyakarta. Sehingga kebudayaan di Yogyakarta Dapat dilestarikan dan dapat dinikmati dan dilihat dari generasi ke generasi

d. Keistimewaan Bidang Tata Ruang.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional dan lokal. Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).

Tata ruang untuk kegiatan pembangunan suatu wilayah, memerlukan informasi spesial yang dapat menggambarkan kondisi fisik suatu daerah. Semakin akurat dan lengkap informasi spasial yang tersedia, maka hasil perencanaan tata ruang juga semakin akurat dan tepat sasaran. Karena perencanaan tata ruang merupakan konsep kegiatan pengelolaan daerah yang memiliki sifat koordinasi antar sektor, berjenjang dan dilaksanakan secara berkesinambungan, maka informasi yang mutakhir pada semua segi, baik berupa data spasial maupun atribut terkait yang menggambarkan kondisi paling terkini, sangat diperlukan.

Jadi tidak salah jika tata ruang di masukan dalam undang undang keistimewaan mengingat begitu pentingnya proses pembangunan jika tidak jelas maka pembangunan tidak ada berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga dengan adanya tata ruang kota yang khusus maka pembangunan akan menjadi lebih baik lagi, dan kota Yogyakarta akan kelibatn semakin indah sehingga semakin banyak lagi pengunjung ke

e. Keistimewaan Bidang Pariwisata

Selain budaya yang masih dilestarikan Yogyakarta juga mempunyai pariwisata yang sangat baik dan di kenal di Indonesia maupun dunia Yogyakarta banyak memiliki potensi wisata alam dan wisata budaya yang banyak di gemari oleh pengunjung

Pariwisata karena Di Indonesia setelah Bali adalah Jogja bahkan dalam musim liburan yang pendek justru Jogja yang menjadi tujuan utama bukan Bali karena Bali terlalu jauh terutama untuk Wisatawan lokal. Oleh karena itu memang pariwisata memang perlu adanya satu regulasi khusus masuk dalam Perda Istimewa harus mengatur bagaimana sumber sumber pusat Wisata itu harus di buat dengan baik missal tentang Wisata Agama Wisata Budaya, Wisata ala mini perlu di kuatkan dalam suatu regulasi Istimewa sehingga dapat menarik Wisatawan asing maupun domestik untuk berbondong bondong ke Jogja, di samping itu perlu juga adaya penyempurna infrastuktur infrastuktur Di Daerah untuk menunjang kelancaran kelancaran Wisatawan sehingga dapat meningkatkan PAD, menurut Partai Golkar DIY.

Pariwisata membawa berbagai manfaat terhadap masyarakat setempat dan sekitarnya. Bahkan pariwisata dikatakan mempunyai energi dobrak yang luar biasa, yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami metamorphose dalam berbagai aspeknya. Pariwisata mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat bahkan bagi Negara

sekalipun, manfaat pariwisata dapat dilihat dari berbagai aspek/segi yaitu manfaat pariwisata dari segi ekonomi, social budaya, lingkungan hidup, nilai pergaulan & ilmu pengetahuan, peluang & kesempatan kerja. Oleh sebab itu maka pengawasan harus di lakukan dengan baik supaya semua bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang di harapkan.

B. Keterlibatan Partai Golkar dalam memperjuangkan Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta.

Sebagaimana slogan Partai Golkar Sultanku Gubernurku dan satu satunya Partai yang mengawali Pro penetapan adalah Partai Golkar sebab berdasarkan hasil musda pada tahun 2004 seluruh kader Golkar harus menanda tangani kontrak politik harus mendukung keistimewaan Yogyakarta, dengan penetapan Sultanku Gubernurku bahkan setiap kader Golkar yang akan menjadi calon anggota legislative harus menandatangani untuk ikut berjuang mendukung Keistimewaan Yogyakarta sebagai salah satu syarat menjadi calon wakil rakyat dari Partai Golkar

Dengan melihat hal tersebut terlihat jelas bahwa Partai Golkar terlibat secara langsung mendukung penetapan Sultan sebagai Gubernur dan Pakualaman sebagai Wakil gubernur dimana dengan berbagai usaha yang dilakukan dalam rangka meyakinkan Pemerintah Pusat bahwa masyarakat Daerah Istimewa Menghendaki penetapan bukan pemilihan melihat keterlibatan langsung maka kita bisa melihat bahwa bukan hanya

omongan semata namun juga tindakan yang nyata yang dilakukan Partai Golkar dan juga simpatisan Partai Golkar dalam mendukung Sultan Gubernurku beberapa kegiatan yang dilakukan adalah: Penggalangan tanda tangan warga Yogyakarta dukung penetapan rapat akbar Di Alun Alun Selatan pada tanggal 30 desember 2007. Yang diikuti puluhanribu warga Yogyakarta gerakan bertanya kepada rakyat dan sejuta tanda tangan dukungan kepada penetapan dan kegiatan kegiatan lainnya. Maka sudah sangat jelas bahwa Partai Golkar terlibat secara langsung dalam mendukung Sri Sultan sebagai Gubernur dan Pakualaman Sebagai Wakil Gubernur.

Tidak hanya sebatas itu namun juga berbagai upaya dilakukan DPC dan DPD Partai Golkar untuk meyakinkan Pemerintah Pusat bahwa masyarakat DIY menghendaki penetapan Sultan sebagai Gubernur dan Pakualaman sebagai Wakil Gubernur, diantaranya Tanggal 10 maret 2008 mengikuti gerak jalan mubeng beteng Gerakan yang diplopori DPC dan DPD Partai Golkar seakan tidak pernah lelah terus berjuang aspirasi masyarakat, dengan rangkaian kegiatan yang dilakukan berkesenambungan setelah gerak jalan Mubeng Beteng pada awal maret 2008 dan 28 april 2008 digelar kegiatan Jelajah Wisata Pro Penetapan lebih dari 50rb mengelilingi kota Yogyakarta dengan berbagai kegiatan yang dilakukan tersebut maka semakin terlihat jelas perjuangan Partai Golkar terhadap Undang Undang keistimewaan Yogyakarta bukan hanya

isapan jempol semata namun juga tindakan yang nyata untuk menyakinkan pemerintah pusat.²⁵

C. Fungsi Partai Golkar Sebagai Partai Politik Terkait Keistimewaan DIY

Wacana Keistimewaan pada dasarnya sudah lama namun akhir akhir kemaren muncul lagi karena masyarakat menginginkan adanya aturan yang jelas mengenai Keistimewaan tidak hanya sekedar pengakuan namun harus ada aturan yang jelas yang mengatur tentang keistimewaan tersebut sehingga tidak menjadi permasalahan lagi dikemudian hari namun bagaimanapun permasalahan yang ada haruslah bisa menjadi jalan kehendak masyarakat bukan hanya kehendak penguasa yang menghendaki kedudukan.

Puncak perdebatan wacana Keistimewaan Yogyakarta terletak sosok kepemimpinan dari keturunan keluarga mengundang reaksi cukup keras dari berbagai kalangan di dalam masyarakat Yogyakarta ketika terpublikannya hasil pembahasan Pansus pada 2003 yang mana dalam pembahasannya RUUK Yogyakarta yang disinyalir akan adanya pemisahan antara kepemimpinan Kraton dengan kepemimpinan Pemerintahan yang mana Kraton hanya sebagai Budaya dan Pemerintahanlah yang kelak mengatur Pemerintahan

²⁵ "D..." "..." "Ke..." "..." "..."

Pengakuan status Keistimwaan sebenarnya sudah ada dalam pasal 18 UUD 1945 serta dalam Amandemennya. demikian juga dengan sejumlah UU mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk Undang Undang nomor 32 tahun 2004.

Partai Politik (Parpol) sebagai lembaga Intermediasi, seharusnya menjadi pihak yang palung dekat dengan keluh kesah rakyat. Guna mewujudkan hal itu Partai Golkar mengerahkan kadernya untuk datang kerumah rumah warga untuk bertanya dan mendengarkan suara suara masyarakat Yogyakarta karena apapun yang terjadi yang merasakan dampak langsungnya adalah masyarakat.

1. Fungsi Artikulasi

Artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijaksanaan pemerintah.²⁶

Konstitusional organisasi Partai Golkar DIY dalam MUSDA VI Tahun 2004 dan MUSDA VII Tahun 2009, Partai Golkar Provinsi DIY memutuskan Keistimewaan dengan 9 unsur yaitu :²⁷

²⁶<http://massofa.wordpress.com/2008/11/17/fungsi-artikulasi-kepentingan/>

²⁷ "Dilansir dari hasil Dokumen Partai Golkar Badanat FRC Tentang Keistimewaan DIY

1. Suksesi kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan penetapan
2. Urusan Pertanahan
3. Urusan Tata Ruang
4. Urusan Sosial dan Kebudayaan
5. Urusan Perimbangan keuangan
6. Urusan Pendidikan
7. Masalah Tata kelola pemerintahan

Disamping itu ketujuh esensi tersebut harus bermuara kepada :

1. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat DIY
2. Keutuhan NKRI

Pada Forum yang terhormat ini FPG menyampaikan bahwa kesembilan esensi merupakan satu kesatuan yang utuh yang harus diperjuangkan secara bersama

Partai Politik merupakan penghubung antara masyarakat dengan Pemerintahan karena kita menganut Demokrasi Perwakilan, Berikut adalah pandangan masyarakat yang tidak setuju terhadap penetapan. Sebagian masyarakat menginginkan Gubernur dan Wakil Gubernur tetap dipilih karena wilayah Pemerintahan Kraton itu secara Hukum dan Politik itu sudah selesai pandangan, karena sekarang ini Kraton hanya sebagai lembaga Kebudayaan. Kraton sekarang dimana sebagai simbol Budaya dan

sebagian masyarakat menilai era mokarki sudah berakhir dan siapa pun yang memimpin wilayah ini layak nya harus di pilih langsung oleh rakyat dan itu tidak disalahkan Menurut DPD partai Golkar DIY

Proses untuk merumuskan dan kemudian menyalurkan sebagai ragam pendapat yang diambil dari berbagai aspirasi maupun kepentingan yang ada di dalam masyarakat kepada pihak penguasa atau pemerintah itu dinamakan Artikulasi Kepentingan (interest articulation).²⁸

Jika kita menelaah lebih dalam lagi semua terlihat jelas bagaimana upaya upaya yang dilakukan oleh partai golkar bukan hanya sekedar dukungan namun juga berupaya berperan penting dimana partai golkar berupaya merumuskan tentang keistimewaan itu sendiri dalam usaha perjuangan terhadap undang undang keistimewaan Yogyakarta disini terlihat jelas dengan berbagai kegiatan yang di lakukan, seperti 27 april 2008 jelajah wisata dalam rangka menyebar blangko jajak pendapat kepada rakyat untuk keistimewaa DIY, 30 desember 2007 – rapat akbar gerakan bertanya kepada rakyat, pro penetapan, gerakan pro penetapan DPD Golkar DIY jalan sehat mubeng beteng. Dan berbagai kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan, dari sana maka bisa kita lihat bahwa bukan hanya slogan semata namun juga berupaya ikut memperjuangan berbagai usaha yang dilakukan untuk keistimewaan DIY, namun yang namanya juga sebuah kebijakan tidak akan bisa memuaskan semua pihak namun

²⁸ Das kamanto, partai politik suatu tinjauan umum, liberty, Yogyakarta, 1984 hal 26

sebaik baiknya kebijakan adalah kebijakan yang mewakili yang mayoritas namun dalam hal ini Partai Golkar tidak mengabaikan terhadap yang menginginkan pemilihan, walau Partai Golkar adalah partai pendukung terhadap penetapan namun Partai Golkar juga melakukan pengambilan jajak pendapat terhadap masyarakat tentang harapan masyarakat Yogyakarta.

2. Fungsi Agregasi

Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, di gabungkan menjadi alternative alternative kebijakan Pemerintah.²⁹

Perjuangan partai Golkar DIY adalah :³⁰

1. Membentuk Tim Diplomasi
2. Membentuk Tim Dialog
3. Gerakan Bertanya Kepada Rakyat Jilid II

Dengan diplomasi dan dialog kami berharap semua hal yang menjadi masalah akan dapat dibicarakan secara baik, baik untuk semuanya. Komunikasi intensif dengan seluruh pemegang otoritas harus dilakukan dengan komunikasi intensif , kami percaya segala hal akan menjadi lancar, kami tidak akan lelah dalam memperjuangkan keistimewaan ini. Gerakan bertanya kepada rakyat jilid II dipandang penting disamping untuk updating

²⁹ <http://massofa.wordpress.com/2008/11/17/fungsi-artikulasi-kepentingan>

³⁰ "Perjuangan Partai Golkar Berlanjut FKG Terus Keistimewaan DIY 12

data, juga untuk meyakinkan semua pihak agar dapat memahami dinamika situasi dan kondisi masyarakat DIY dalam memperjuangkan Keistimewaan Yogyakarta.

Melihat hal tersebut maka kita dapat memahami bahwa partai Golkar melakukan upaya upaya dalam pengambilan suara tentang harapan masyarakat Yogyakarta, dimana partai mendengarkan suara rakyat dengan adanya tim dialog dan tim diplomasi tentunya suara masyarakat akan mendengarkan.

Golkar dalam hal Agresgasi kepentingan ini sudah sangat baik dimana dengan membentuk tim tim yang mana partai Golkar berupaya untuk bisa memahami tentang harapan masyarakat Yogyakarta dengan pembentukan tim tim tersebut tentu harapannya supaya Partai Golkar dapat memahami tentang masyarakat untuk sebuah undang undang keistimewaan Yogyakarta.

3. Fungsi Sosialisasi

Golkar dalam perjalanan untuk memperjuangkan Undang Undang Keistimewaan dengan melakukan Komunikasi Politik dengan berbagai stekholder dengan tahap awal yaitu dengan melakukan penyerapan aspirasi masyarakat Yogyakarta dengan roodshow Kabupaten Kota Se DIY, dan hasil paling diarahkan ke kraton dan 86,7 persen untuk

Penjajakan pendapat termasuk dengan tim Jurusan IP Gajah Mada yang diperintahkan oleh Menteri dalam Negeri untuk menyusun naskah akademiknya Keistimewaan DIY Drs Kornislei Dosen Fisipol Gajah Mada disamping itu juga melakukan disini dengan alumni UGM, Agama yang dipimpin Subekti Mantan Bupati Gunung Kidul dan juga dengan unsur Pemerintah DIY dan hasil Komunikasi Politik itu yang bisa di simpulkan kita sampaikan pada satu kesimpulan pemahaman yang sama bahwa di lihat dari historis perjalanan baik secara Historis Sosiologis secara Hukum secara Politik DIY layak didudukan sebagai Daerah Istimewa yang harus dilengkapi dengan aturan yang Istimewa juga sesuai dengan amanat Undang Undang 45 dan juga menghormati daerah hak asal usul dari daerah yang Istimewa dan menurut kesejarahan memang satu satunya Negara yang merdeka sebelum Indonesia lahir itu nagari NyaYogyakarta Hadiningrat dibawah pimpinan Sultan itu negeri yang memberikan pengakuan utama lahirnya Negara Republik Indonesia karena pengakuan penting terhadap kedaulatan pada waktu itu maka pada waktu itu Bung Karno memberikan penghormatan bahwa daerah ini menjadi Daerah Istimewa karena pada waktu itu Sultan mengatakan bahwa Negara yang merdeka tapi lahirnya Indonesia itu maka Sultan memberikan dukungan dan sekaligus menyatakan bergabung dengan Indonesia maka Bung Karno memberikan apresiasi Sikap Politik yang diambil pada saat itu dan pada saat yang sama Bung Karno juga memberikan penghargaan baktis daerah

Istimewa dan Sultan sebagai Kepala Daerah

Sosialisasi sangat penting guna mengetahui bagaimana dan apa sebenarnya harapan masyarakat DIY tentang daerahnya, Partai Golkar dalam hal ini sudah cukup baik karena Partai Golkar melakukan penyerapan aspirasi ke masyarakat guna sebagai pertimbangan sebelum mengambil keputusan.

4. Fungsi Manajemen Konflik

Sikap-sikap DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengenai Keistimewaan DIY khususnya soal pengisian jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur DIY (satu suara). hal itu terlihat dari pandangan Fraksi Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD DIY, Rabu (23/4), di Gedung DPRD DIY jalan Malioboro Yogyakarta.

Partai PDIP mengusulkan agar presiden segera menerbitkan keputusan Presiden mengangkat dan menetapkan Sultan HB dan PA ix sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur sambil menunggu UUK DIY

Menurut Fraksi PAN seperti tertuang dalam pandangan umum Fraksi PAN, jika undang Undang Keismewaan DIY belum juga ada sampai masa jabatan Gubernur DIY berakhir bulan oktober maka sebagai masa transisi Sultan HB X/PA IX agar kembali diangkat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur satu periode lagi

Sedangkan Fraksi PKS tidak secara tegas Pemilihan atau Penetapan mengusulkan namun menyatakan seluruh aspirasi yang berkembang di masyarakat baik info Pemilihan atau Penetapan

Fraksi Partai Golkar mengusulkan penetapan Sultan Hamengku Buwono (HB) x dan Paku Alam (PA) sebagai Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah yang bertanggung jawab kepada Presiden. Bukan hanya itu namun juga sesuai dengan hasil survei dilakukan hasilnya mayoritas masyarakat mendukung penetapan dan Partai Golkar merupakan Partai suara rakyat jadi Partai Golkar juga mendukung penetapan, selain itu juga Partai Golkar juga melihat dari sejarah DIY. Dan Partai Golkar merasa kayak jika Yogyakarta ini menjadi daerah Istimewa.

D. Fungsi Partai Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintahan

Partisipasi Politik adalah aktifitas warga Negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan Politik. Partisipasi Politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warga Negara, bukan Politikus ataupun Pegawai Negeri. Sifat Partisipasi Politik ini adalah suka rela, bukan di mobilisasi oleh Negara ataupun Partai berkuasa³¹

Tarik menarik pembahasan Rancangan Undang Undang Keistimewaan (RUUK) DIY menjadi perhatian yang serius dari berbagai

³¹ <http://setabari01.wordpress.com/2012/12/06/partisipasi-politik/>

pihak ini merupakan karena banyak pandangan tentang Undang undang Keistimewaan DIY, ini sangat penting mengingat sejarah DIY. Bagaimanapun permasalahan Yogyakarta bukan permasalahan yang mudah mengingat Daerah ini menjadi Daerah yang mempunyai ciri yang khusus yang berbeda dengan Daerah Daerah lainya di harapkan permasalahan ini bukan hanya untuk sementara mengingat pentingnya untuk kemajuan daerah Yogyakarta di kemudian hari.

Partai Golkar mengusulkan supaya Daerah bisa mengedepankan kepentingan masyarakat dan Partai mennghendaki 5 subtansi penting pertama: masalah pertahanan, masalah tata ruang , masalah kebudayaan , masalah kelembagaan ,masalah kepariwisataan dan lima subtansi itu masuk dalam undang undang DIY dan berharap dapat berjalan dengan baik.

Negara sudah mengakui hanya pada waktu itu tentang ke Istimewaan DIY hanya saja baru sebatas pokok-pokoknya saja. Namun subtansi intinya secara utuh kandungan didalamnya belum di atur secara tegas , menurut golkar kalau Negara ini mau mengakui daerah ini sebagai daerah istimewa maka Negara juga harus juga harus mau untuk mengatur secara lebih utuh sehingga posisi segala kewenangan keistimewaan DIY di hargai secara baik.

Harapannya kelima subtansi ini bukan hanya sebatas wacana namun bisa di laksanakan yang tentunya dengan melibatkan masyarakat dan

juga untuk kepentingan masyarakat DIY sehingga masyarakat dapat merasakan dampak langsung dari pada Keistimewaan DIY.

E. Peran Partai Golkar terhadap Undang Undang Keistimewaan

Yogyakarta

Permasalahan Otonomi Daerah Penyelenggaraan Ekonomi Daerah dan Desentralisasi ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Banyak permasalahan muncul karena kemampuan daerah daerah yang variatif, untuk ini perlu pengenalan dan kajian lebih jauh untuk mengatasi segala persoalan yang mampu menghambat penyelenggaraan Otonomi dan Desentralisasi. Pengenalan permasalahan dilapangan, apakah itu dari aspek sosial, budaya, politik maupun ekonomi, ditujukan untuk mengantisipasi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan fungsi Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Dengan teridentifikasinya permasalahan yang berkaitan dengan fungsi Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pemerintah kota mampu mengelola semua persoalan dan harapan Publik sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga Otonom

Sejak berlakunya otonomi daerah permasalahan daerah diserahkan berbagai urusan kepada daerah, pemilihan kepala daerah secara langsung, semakin banyak muncul daerah baru hasil dari pemekaran daerah, dan lahirnya beberapa partai lokal. Memang tidak disangkal lagi, bahwa otonomi daerah membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah

sendiri, Dengan adanya otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan pemerintah cenderung lebih mengerti keadaan dan situasi, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya dari pada pemerintah pusat. Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian diharapkan masing-masing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing.

Namun berbeda halnya dengan daerah Yogyakarta karena daerah ini merupakan daerah istimewa ada alokasi khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke daerah dalam hal ini Yogyakarta mendapatkan dana alokasi khusus sebesar 500 miliar sebagai daerah istimewa. Ini lah yang menjadi salah satu perjuangan mengapa masyarakat mempertahankan keistimewaan Yogyakarta.

Dalam UU No. 3 1950, UU ini hanya bersifat umum dan tidak menjelaskan substansi dari pada ke istimewa secara konperhensif.

Dalam pasal 1 ayat 2 hanya menyatakan bahwa daerah istimewa

Yogyakarta setingkat provinsi dengan 13 urusan rumah tangga dan 40 org wakil DPRD di provinsi”

Fraksi Partai Golkar DPRD DIY menyatakan secara tegas mendukung penetapan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam yang bertahta sebagai sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY. Sikap politik Fraksi Partai Golkar itu secara resmi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD DIY tentang penentuan sikap politik DPRD DIY tentang keistimewaan DIY, Senin (13/12/2010).³²

Lima sikap F Partai Golkar DPRD DIY itu, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa setingkat Provinsi pada sistem pemerintahan NKRI harus dipertahankan. Kedua, pemerintah pusat dan DPR RI segera membentuk UU Keistimewaan DIY sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 18B dan UU nomor 32 Tahun 2004. Ketiga, dalam UU sebagaimana tersebut pada butir nomor. 2, tata cara pengisian jabatan Gubernur dan wakil gubernur DIY dengan penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam yang bertahta. Keempat, Keputusan DPRD DIY tentang keistimewaan DIY untuk diteruskan kepada pemerintah pusat dan DPR serta DPD. Kelima, seluruh esensi keistimewaan DIY harus bermuara pada kesejahteraan rakyat dan terjaminnya keutuhan NKRI.

Disini sudah sangat jelas bahwa Partai Golkar sangat mendukung terhadap undang-undang keistimewaan Yogyakarta, ketetapan sikapnya

maka jelas bahwa Partai Golkar sangat berperan terhadap undang Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga partai partai lain tentunya, peran partai golkar dalam memperjuangkan undang undang keistimewaan bukan terletak pada kedekatan Partai Golkar dengan kraton namun juga terlebih kepada keinginan masyarakat Yogyakarta yang menghendaki pengukuhan Sri Sultan sebagai Gubernur dan Pakualaman sebagai wakil gubernur. Ini terlihat jelas melalui sikap Partai Golkar.

Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santosa, menegaskan parpolnya sepenuhnya mendukung RUUK DI Yogyakarta. Dukungan itu sesuai dengan dengan aspirasi masyarakat Yogyakarta, yaitu penetapan Sultan dan Paku Alam yang bertahta langsung menjadi gubernur dan wakil gubernur.³³

Walau Partai Golkar ada kedekatan dengan pemerintah Yogyakarta namun sikap yang diberikan bukan terletak pada kedekatan namun lebih kepada kehendak masyarakat Yogyakarta disini jelas dengan dilakukannya survei yang dilakukan Partai Golkar sebelum melakukan sikapnya terhadap ke Istimewaan Yogyakarta.

Kedekatan Partai Golkar terhadap Pemerintah, Sri Sultan memimpin Partai Golkar tiga periode hanya berdasarkan Undang Undang Keistimewaan maka Sultan harus melepaskan seluruh atribut baik sebagai anggota ataupun pengurus Partai Politik supaya Sri sultan sebagai bapak

yang netral dan pada waktu Partai Golkar ketemu dengan antar lintas Partai Politik Golkar tidak keberatan untuk melepas dari keanggotaan Partai Golkar asal untuk kepentingan masyarakat Yogyakarta dan itu dilakukan Partai Golkar, Golkar dalam hal ini mengiklaskan secara tulus kalau memang ngarso dalem keluar demi kepentingan masyarakat Jogja justru Golkar memberikan kader terbaiknya untuk rakyat Yogyakarta dan tidak menjadi masalah buat Partai Golkar tetapi tentunya hubungan silaturahmi sebagai sesama anak bangsa, dalam mengawal pemerintahan itu Partai Golkar punya tiga prinsip Partai Golkar memberikan pengawasan terhadap pemerintah pertama Golkar harus membangun landasan berpikirnya memeberikan pengawasan itu harus (rasional) objektif tetap kritis namun ke kritisannya juga harus Proposional.

Berikut sikap fraksi-fraksi di DPR terkait keistimewaan DIY seperti yang dilansir dari Kompas sebelum di sahkannya undang undang keistimewaan DIY :³⁴

Partai Golkar: Kami akan bersungguh-sungguh mempertahankan keistimewaan Yogyakarta (Priyo Budi Santoso, Ketua DPP Golkar)

PDI Perjuangan: Keistimewaan Yogyakarta menyatu dengan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Untuk itu, kami mendukung penetapan. Namun, Sultan HB X juga harus memposisikan dirinya sebagai

³⁴ *Petapolitik.com*

Gubernur dan Sultan untuk semua masyarakat Yogyakarta, tidak menjadi milik Partai Politik tertentu (Tjahjo Kumolo, Sekjen PDI Perjuangan)

PKS: PKS menyesuaikan diri dengan keinginan masyarakat Yogyakarta. Kami pernah survei, dan umumnya warga Yogya pilih penetapan (Mahfudz Siddiq, Wakil Sekjen PKS)

PAN: Sebelum menentukan sikap, kami akan menimbang kelebihan dan kekurangan naskah RUU usulan pemerintah (Teguh Juwarno, Sekretaris Fraksi PAN DPR)

PPP: Perkembangan historis, sosial, dan politik membuat kami memutuskan mendukung penetapan. Persoalan jika sultan dinilai terlalu tua atau masih kanak-kanak bisa diatasi dengan membuat aturan perwalian (M Romahurmuzly, Sekretaris FPPP DPR)

Partai Gerindra: Kami mendukung Sultan sebagai Gubernur dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur Yogyakarta. Namun, Sultan harus meninggalkan posisinya di partai politik, karena dia milik semua golongan (Ahmad Muzani, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR)

Partai Hanura: Kami tetap menginginkan penetapan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta. Sikap ini untuk menghormati keistimewaan Yogyakarta, penghargaan kepada sejarah daerah itu, dan untuk memenuhi aspirasi masyarakat Yogya (Sarifuddin Sudding, Wakil

Ketua Fraksi Hanura DPR) [ok]

Sebenarnya semua sudah cukup jelas bahwa bila hampir semua dari masyarakat dan kehendak masyarakat semua menginginkan penetapan, lebih dari itu supaya semua jelas aturannya juga jelas bagaimana keistimewaan DIY itu karena dahulu juga Yogyakarta sudah menjadi daerah istimewa namun belum ada aturan yang jelas bagaimana keistimewaan itu, itulah sebabnya mengapa keistimewaan DIY kemaren mencuat kembali kepermukaan supaya ada aturan yang jelas bagaimana dan apa saja keistimewaan DIY di bandingkan dengan daerah daerah lainnya.

Gerakan Pro Penetapan (GPP) adalah sebuah gerakan yang dibentuk oleh Partai Golkar DIY dengan berbagai gerakan seperti, Sejuta tandatangan, Senam Kolosal Pro Penetapan dengan 200 ribu orang di alun – alun utara, Kawula Maneges Sultan dengan melibatkan 250 ribu orang di Alun – alun Utara, Gerak Jalan Pro Penetapan yang melibatkan 150 ribu orang di alun – alun selatan, Jelajah Pro Penetapan yang melibatkan hampir 300 ribu orang menjelajahi seluruh wilayah Provinsi DIY, dan puncaknya adalah Gerakan Bertanya kepada rakyat, yang melibatkan hampir 1,5 juta warga DIY, yang hasilnya 86,7 persen rakyat DIY menghendaki penetapan Sri Sultan HB X sebagai Gubernur dan Sri Paduka Pakualam IX sebagai Wakil Gubernur dan muncul semangat

dan tekad yang luar biasa dengan motto perjuangan Partai Golkar yaitu Sultanku Gubernurku, Pakualamku Wakil Gubernurku.³⁵

Melihat partisipasi masyarakat yang begitu besar maka kita bisa melihat bagaimana harapan masyarakat terhadap Daerah ini dan begitu besarnya harapan masyarakat kepada Sri Sultan dari sana kita bisa melihat bagaimana upaya Partai Golkar dukungan pro penetapan sesuai dengan apa harapan masyarakat Yogyakarta. Dan hasil survai yang sangat dominan juga bisa kita lihat tetap penetapan 86,7 % hasil yang cukup besar. Tidak salah jika Partai Golkar mendukung dari pada penetapan karena jelas sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta,

Demikian halnya dengan Survei dari universitas gajah mada (UGM) misalnya membuktikan, 75% masyarakat Yogyakarta menginginkan penetapan, dan juga dari Survey univesitas universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengatakan 93,6% masyarakat menginginkan penetapan maka sudah begitu jelas begitu besarnya harapan masyarakat Yogyakarta terhadap Sri Sultan sebagai Gubernur dan Pakulamanan sebagai wakil gubernur dan itu tidak sia sia perjungan Partai Golkar dan masyarakat Yogyakarta dengan disahkannya Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta.

³⁵ "Dikutip dari hasil Dokumen Partai Golkar Bendahar EPG Tentang Keistimewaan DIY. 13

Harapan Partai Golkar Implementasi undang undang ini betul betul harus dijalankan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Yogyakarta bukan untuk kemaslahatan pihak pihak tertentu apa lagi hanya dinikmati oleh Kraton baik dari Kraton Hadi Ningrat maupun dari Pakualaman tetapi kedua lembaga ini menjadi Pelopor pelaksanaan Undang Undang Keistimewaan ini dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat DIY itu yang paling penting menurut Partai Golkar karena perjuangan Keistimewaan ini bukan perjuangan Kraton namun perjuangan masyarakat DIY dan kedua Kraton itu harus menjadi pasilitator yang baik untuk kepentingan masyarakat DIY dan semua harus dikembalikan kemasyarakat DIY, namun harapan itu diharapkan tidak hanya sebatas wacana namun harus ada tindakan yang rill tentang bagaimana sebuah partai bisa menjadi penyalur aspirasi masyarakat bukan hanya sekedar slogan semata, sebagai partai yang berslogan partai rakyat di harapkan partai golkar membawa aspirasi masyarakat terutama masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta